

# **BAGIAN ANGGARAN 010.03**



## **LAPORAN KEUANGAN**

**UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I  
( UAPPA - E1)**

**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.**

**AUDITED**

***UNTUK PERIODE SEMESTER YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2018***

~  
~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~

**JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 TLP. 3457187  
JAKARTA**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Dalam Negeri yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2019

DIREKTUR JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

SOEDARMO  
NIP 19590925 201507 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran-Lampiran	

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dan Eselon 1 selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2019

DIREKTUR JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

SOEDARMO  
NIP 19590925 201507 1 001

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.842.724.245,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA.2018 adalah sebesar Rp239.587.221.652,- atau mencapai 98,99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp242.024.698.000,-.

## **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp.21.549.390.534,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp17.931.981.789,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.3.275.127.745,-; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp.7.462.500,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.334.818.500,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar Rp.21.549.390.534,- masing-masing Kewajiban sebesar Rp.0,- dan Ekuitas sebesar Rp.20.105.404.894,-.

# I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM UAPPA - E1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	842,724,245	#DIV/0!	739,493,149
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>842,724,245</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>739,493,149</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	31,748,514,245	30,600,417,370	96.38	26,717,613,315
Belanja Barang	B.4	208,112,873,000	206,825,549,610	99.38	118,838,067,610
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-		-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>239,861,387,245</b>	<b>237,425,966,980</b>	<b>98.98</b>	<b>145,555,680,925</b>
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Tanah	B.6	-	-		-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	2,163,311,000	2,161,254,672	99.90	1,336,479,720
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-		-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-		-
Belanja Modal Lainnya	B.10	-	-		-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>2,163,311,000</b>	<b>2,161,254,672</b>	<b>99.90</b>	<b>1,336,479,720</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>242,024,698,245</b>	<b>239,587,221,652</b>	<b>98.99</b>	<b>146,892,160,645</b>

**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**  
**UNIT AKUNTASI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN (UAPPA - E1)**

**N E R A C A**

**PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	934,563,600
Piutang PNBP	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	17,984,589,235	17,970,089,235
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	(89,922,946)	(89,850,446)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbend/TGR (Netto)	C.8	17,894,666,289	17,880,238,789
Persediaan	C.9	37,315,500	27,892,000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>17,931,981,789</b>	<b>18,842,694,389</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.10	7,500,000	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	(37,500)	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>7,462,500</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	12,557,455,884	11,382,851,511
Gedung dan Bangunan	C.15	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	800,000	800,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(9,283,128,139)	(9,021,580,532)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>3,275,127,745</b>	<b>2,362,070,979</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.20	1,750,377,750	1,750,377,750
Aset Lain-Lain	C.21	985,788,299	932,335,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(2,401,347,549)	(2,388,196,000)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>334,818,500</b>	<b>294,516,750</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>21,549,390,534</b>	<b>21,499,282,118</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	1,443,985,640	840,836,853
Utang Jangka pendek Lainnya	C.25	-	87,048,088
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>1,443,985,640</b>	<b>927,884,941</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1,443,985,640</b>	<b>927,884,941</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.26	20,105,404,894	20,571,397,177
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>20,105,404,894</b>	<b>20,571,397,177</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>21,549,390,534</b>	<b>21,499,282,118</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

#### UAPPA - E1

#### LAPORAN OPERASIONAL

#### UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	81,517	5,814,533
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>81,517</b>	<b>5,814,533</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	31,984,255,010	26,710,934,656
Beban Persediaan	D.3	68,279,100	768,333,875
Beban Barang Jasa	D.4	148,367,184,818	62,338,488,715
Beban Pemeliharaan	D.5	696,572,620	885,593,202
Beban Perjalanan Dinas	D.6	57,680,124,272	54,880,526,768
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,207,034,156	1,139,021,973
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	110,000	-
Beban Lain-Lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>240,003,559,976</b>	<b>146,722,899,189</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(240,003,478,459)</b>	<b>(146,717,084,656)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.12		
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		792,988,769	228,834,348
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		800,076,569	310,814,619
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		7,087,800	743,050
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>792,988,769</b>	<b>538,905,917</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(239,210,489,690)</b>	<b>(146,178,178,739)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.13		
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(239,210,489,690)</b>	<b>(146,178,178,739)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM  
UAPPA – E1  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	20,571,397,177	20,596,908,420
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(239,210,489,690)	(146,178,178,739)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>		<b>238,744,497,407</b>	<b>146,152,667,496</b>
KENAIAKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(465,992,283)	(25,511,243)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.8	<b>20,105,404,894</b>	<b>20,571,397,177</b>

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Ditjen Poltik dan Pemerintahan Umum.

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, memfasilitasi politik dalam negeri, memfasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, memfasilitasi kewasdaan nasional, membina ideologi karakter dan wawasan kebangsaan serta mewujudkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang lebih baik.

Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Sistem Politik yang Demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembangunan bangsa, kesadaran dan kemampuan bela Negara serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum segenap warga, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi pengutan integrasi sosial.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	29,802,000,000	31,748,514,000
Belanja Barang	100,831,816,000	208,112,873,000
Belanja Modal	700,000,000	2,163,311,000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>131,333,816,000</b>	<b>242,024,698,000</b>

Sedangkan apabila dilihat dari kegiatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum maka perubahannya adalah sebagai berikut;

KODE	KEGIATAN	TAHUN 2018	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
1231	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	14,270,000,000	13,056,607,000
1232	Fasilitasi Politik Dalam Negeri	31,525,000,000	141,306,469,000
1233	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7,337,227,000	6,954,686,000
1234	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	14,350,000,000	13,969,152,000
1235	Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan	12,250,000,000	11,850,000,000
1236	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Polpum	51,601,589,000	54,887,784,000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>131,333,816,000</b>	<b>242,024,698,000</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	TA.2018	TA.2017
Uang UP/TUP	-	-
Rekening Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0,-*

### C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- dan Tahun 2017 sebesar Rp.934.563.600,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Jenis	TH 2018	TH 2017
Pajak PPh yang belum disetor	-	87,048,088
Beban Tunjangan Khusus	-	66,826,659
Utang pihak ketiga lainnya (tunjangan kinerja Pegawai)	-	780,688,853
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>934,563,600</b>

*Bagian Lancar  
TP/TGR  
Rp17.984.589.235,-*

### C.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp17.984.589.235 dan Rp17.970.089.235. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut :

*Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR*

No	Nama	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Ir. Suwarno Putra Raharja (alm)	17,970,089,235	17,970,089,235
2	Sri Rosmalawati, SH	14,500,000	-
<b>Jumlah</b>		<b>17,984,589,235</b>	<b>17,970,089,235</b>

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB  
Rp81.517,-

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.81.517,- dan Rp.5.814.533,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Jenis Pendapatan	TH 2018	TH 2017	%
Pendapatan Jasa giro	81,517	17,997	452.95
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	5,796,536	-
<b>Jumlah</b>	<b>81,517</b>	<b>5,814,533</b>	<b>1.40</b>

Beban Pegawai  
Rp.31.984.255.010,-

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.31.984.255.010,- dan Rp.26.710.934.656,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK TURUN %
Beban Gaji Pokok PNS	11,072,141,800	10,986,031,000	0.78
Beban Pembulatan Gaji PNS	153,356	139,685	9.79
Beban Tunjangan Suami/Istri	755,473,240	717,837,450	5.24
Beban Tunjangan Anak	204,189,474	191,520,104	6.62
Beban Tunjangan Struktural	1,291,360,000	1,195,650,000	8.00
Beban Tunjangan Fungsional	-	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan PPH	45,328,452	82,398,567	(44.99)
Beban Tunjangan Beras	519,323,820	524,538,060	(0.99)
Beban Uang Makan	1,161,629,000	1,137,730,000	2.10
Beban Tunjangan Lain-Lain	-	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan Umum	331,345,000	307,235,000	7.85
Beban Lembur	-	-	#VALUE!
Beban Tunjangan Khusus	16,603,310,868	11,567,854,790	43.53
<b>Jumlah</b>	<b>31,984,255,010</b>	<b>26,710,934,656</b>	<b>19.74</b>

Perbedaan nilai pada Beban Pegawai pada LO sebesar Rp.31.984.255.010,- sedangkan Nilai Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp.30.600.417.370,- sehingga terjadi perbedaan sebesar Rp.1.383.837.640,- hal ini karena pengakuan Beban Pegawai pada Laporan Keuangan Tahun 2018 yang ditagihkan bulan Januari 2019 sebesar Rp.1.383.837.640,-. Pada Tahun 2019 LO tidak mengakui Beban Belanja Pegawai lagi (mengurangi nilai Beban Belanja Pegawai) dengan rincian sebagai berikut :

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*

*Rp20.571.397.177,-*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp20.571.397.177,- dan Rp20.596.908.420,-.

*Surplus (defisit) LO*

*Rp.(239.210.489.690)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah defisit sebesar Rp(239.210.489.690) dan Rp(146.178.178.739). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif*

*Perubahan*

*Kebijakan*

*Akuntansi/Kesalahan*

*n Mendasar Rp0,-*

### **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Penyesuaian Nilai*

*Aset Rp(0)*

### **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terkahir.

*Koreksi Nilai*

*Persediaan Rp0,-*

### **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Transaksi Antar*

*Entitas*

*Rp238.744.497.407,-*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar entitas untuk periode berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.238.744.497.407,- dan Rp.146.152.667.496,-. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berada baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Nihil

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-9709 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri : Bahwa sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum adalah Didi Suidiana, SE. MM.
- b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900-5879 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900-027 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Kemitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Satuan Kerja Ditjen Polpum sebagai berikut;
  - 1) Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si sebagai PPK pada Dit. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
  - 2) Drs. La Ode Ahmad, M.Si sebagai PPK pada Dit. Politik Dalam Negeri
  - 3) Sri Rosmalawati, SH. sebagai PPK pada Dit. Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  - 4) Drs. Lutfi TMA, M.Si sebagai PPK pada Dit. Organisasi Kemasyarakatan.
  - 5) Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si sebagai PPK pada Dit. Kewaspadaan Nasional.
  - 6) Drs. Syarmadani, M.Si. sebagai PPK pada sekretariat Ditjen Polpum.
  - 7) Kartita Mulia Sari, S.STP. MA. sebagai PPSPM.
- c. Keputusan Menteri Dalam negeri nomor 954-3666 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 954-026 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum adalah;
  - 1). Andhita Ariwibowo, SE. sebagai Bendahara Pengeluaran Ditjen Polpum
  - 2). Budi Sitepu,S.IP M.Si, sebagai BPP pada Dit.Bina Ideologi, Karakter dan Wasbang.
  - 3). Uyunul Bayani Amsak, S.IP sebagai BPP pada Dit. Politik Dalam Negeri.
  - 4). Retno Ekowati, A.Md sebagai BPP pada Dit. Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  - 5). Grafika Hardiany Parebong, SE. sebagai BPP pada Dit. Organisasi Kemasyarakatan
  - 6). Dival Mustafa, S.STP sebagai BPP pada Dit. Kewaspadaan Nasional.
  - 7). Bubi Kusdi, SE. sebagai BPP pada Sekretariat Ditjen Polpum
- d. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900-028 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Ditjen Polpum Tahun 2018 ;
  - Ida Cintia Dewi sebagai Petugas Pengelola administrasi belanja Pegawai Ditjen Polpum.

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM  
UAPPA – E1  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	20,571,397,177	20,596,908,420
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(239,210,489,690)	(146,178,178,739)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>		<b>238,744,497,407</b>	<b>146,152,667,496</b>
KENAIAKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(465,992,283)	(25,511,243)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.8	<b>20,105,404,894</b>	<b>20,571,397,177</b>